



**ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PENYUSUNAN MASTERPLAN BERBASIS KELURAHAN DALAM PROGRAM GANDENG GENDONG (STUDI KASUS KELURAHAN GEDONGKIWO, YOGYAKARTA)**

***STAKEHOLDER ANALYSIS IN PREPARATION OF KELURAHAN-BASED MASTER PLAN IN THE GANDENG-GENDONG PROGRAM (CASE STUDY OF KELURAHAN GEDONGKIWO, YOGYAKARTA)***

Adji Rahmad Maulana<sup>1</sup>, Marita Ahdiyana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>2</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article history:

Diterima 16-11-23

Diperbaiki 16-12-23

Disetujui 21-12-23

Kata Kunci:

Analisis Stakeholder,  
Masterplan, Kemiskinan,  
Pembangunan Wilayah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan analisis stakeholder dalam penyusunan masterplan berbasis Kelurahan dalam Program Gandeng Gendong, Studi Kasus Kelurahan Gedongkiwo. Penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui peran dan jenis masing-masing stakeholder dalam penyusunan masterplan Kelurahan Gedongkiwo. Yang kemudian hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi yang dapat berguna untuk evaluasi Masterplan Kelurahan Gedongkiwo.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Sementara penentuan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive. Instrument penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sementara tahapan analisis data dalam penelitian ini antara lain Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada sembilan stakeholder yang terlibat dalam penyusunan masterplan sesuai dengan unsur 5K (Kampus, Kampung, Kota, Korporasi, dan Komunitas) dalam program Gandeng Gendong. Kesembilan stakeholder tersebut terbagi kedalam beberapa kategori, antara lain BAPPEDA Kota Yogyakarta, Kemantren Mantrijeron, Kelurahan Gedongkiwo sebagai stakeholder kunci. Kemudian LPMK, Ketua Kampung, Komunitas Kelurahan Budaya, dan masyarakat sebagai stakeholder primer. Dan Ikatan Arsitek Indonesia dan CV. Trimatra sebagai stakeholder sekunder. Dalam hal ini CV. Trimatra memiliki peran paling dominan dalam penyusunan masterplan Kelurahan Gedongkiwo. Karena dalam hal ini CV. Trimatra merupakan otak dari penyusunan masterplan Kelurahan Gedongkiwo sebagai bentuk mandat dari Pemerintah Kota Yogyakarta. CV. Trimatara mengontrol seluruh anggaran yang ada dan melakukan pelaksanaan penyusunan masterplan Gedongkiwo mulai dari sosialisasi, proses wawancara, FGD, dan penyusunan hasil akhir. Sementara masyarakat menjadi stakeholder yang memiliki peran sangat minim. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui adanya masterplan Kelurahan Gedongkiwo. Keberlanjutan masterplan sebagai roadmap pembangunan di Gedongkiwo juga masih dipertanyakan, karena staff Kelurahan Gedongkiwo tidak mengetahui adanya program ini. Sehingga masterplan Kelurahan Gedongkiwo sebaiknya dilakukan review kembali untuk merumuskan potensi-potensi kampung yang dapat memberdayakan masyarakat sehingga mampu menekan tingkat kemiskinan yang ada di Kota Yogyakarta.

DOI: <https://doi.org/zzzz/i.vxxx.xxx>

ABSTRACT

Keywords:  
Stakeholder Analysis,  
Masterplan, Poverty,  
Regional Development

This research aims to explain stakeholder analysis in preparing a sub-district-based master plan in the Gandeng Gendong Program, Case Study of Gedongkiwo Subdistrict. This research is important to conduct to determine the role and type of each stakeholder in preparing the Gedongkiwo Village master plan. Then the results of this research can add insight and information that can be useful for evaluating the Gedongkiwo Village Masterplan.

This research was conducted using qualitative methods. Meanwhile, determining the data source in this research uses a purposive technique. The research instrument in this research is the researcher himself. Meanwhile, the stages of data analysis in this research include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this research show that there are nine stakeholders involved in preparing the master plan in accordance with the 5K elements (Campus, Village, City, Corporation and Community) in the Gandeng Gendong program. The nine stakeholders are divided into several categories, including BAPPEDA Yogyakarta City, Kemantren Mantrijeron, Gedongkiwo Village as key stakeholders. Then LPMK, Village Head, Cultural Village Community, and the community as primary stakeholders. And the Indonesian Architects Association and CV. Trimatra as a secondary stakeholder. In this case CV. Trimatra has the most dominant role in preparing the master plan for Gedongkiwo Village. Because in this case CV. Trimatra is the brain behind the preparation of the master plan for Gedongkiwo Village as a form of mandate from the Yogyakarta City Government. CV. Trimatara controls the entire existing budget and carries out the preparation of the Gedongkiwo master plan starting from socialization, interview process, FGD, and preparation of the final results. Meanwhile, the community is a stakeholder who has a very minimal role. This is proven by the fact that there are still people who are not aware of the Gedongkiwo Village master plan. The sustainability of the master plan as a development roadmap in Gedongkiwo is also still being questioned, because Gedongkiwo Village staff are not aware of the existence of this program. So, the master plan for Gedongkiwo Village should be reviewed again to formulate the potential of the village which can empower the community so that it can reduce the level of poverty in Yogyakarta City.

1. Pendahuluan

Salah satu daerah yang masih berkuat dengan permasalahan kemiskinan adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah dengan presentase kemiskinan paling tinggi ketiga secara nasional dengan presentase 11,49 lebih tinggi dari presentase kemiskinan nasional sebesar 9,57 (BPS, 2023). Jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung meningkat dari tahun ke tahun, terutama dari Periode 2021 hingga 2022. DIY mengalami peningkatan presentase kemiskinan sebesar 0,15 persen menjadi 11,49 dibanding dengan semester awal 2022 dibulan Maret (BPS, 2023).

Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin DIY

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan)			
	2019	2020	2021	2022
D.I. Yogyakarta	448.47	475.72	506.45	463.63
Kulonprogo	74.62	78.06	81.14	
Bantul	131.15	138.66	146.98	
Gunungkidul	123.08	127.61	135.33	
Sleman	90.17	99.78	108.93	
Yogyakarta	29.45	31.62	34.07	

Kota Yogyakarta menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit di DIY. Namun jika dilihat dari statistik terjadi peningkatan jumlah kemiskinan dari tahun ke tahun sejak 2019 hingga 2021. Naiknya tren kemiskinan tidak hanya terjadi di Kota Yogyakarta tetapi di wilayah lain juga mengalami hal

yang sama (Laporan Kinerja Institusi Pemerintah Kota Yogyakarta, 2020). Kota Yogyakarta menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit diantara kabupaten lain sebesar 34,07 ribu orang (BPS, 2023).

Tahun 2021 Kota Yogyakarta mengalami kenaikan indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 87,81. Ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang berada diangka 86,61, kenaikan IPM ini juga mengungguli IPM nasional sebesar 72. Namun naiknya IPM ini tidak dibarengi dengan penurunnya tingkat kemiskinan. Periode September 2020 kemiskinan naik menjadi 7,69% atau naik sebesar 0,42% dibandingkan tahun 2020 (Susenas, 2021). Permasalahan ini menjadi menarik karena naiknya IPM tidak diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta.

Permasalahan lain yang ada di Kota Yogyakarta adalah angka ketimpangan yang masih tinggi. Indeks Gini Ratio Kota Yogyakarta pada 2021 sebesar 0,464 yang cenderung meningkat dari dua tahun sebelumnya. Pada 2021 Kota Yogyakarta menjadi wilayah DIY yang memiliki tingkat ketimpangan yang paling tinggi dibanding dengan wilayah lainnya. Bahkan Indeks Gini Kota Yogyakarta tahun 2021 melebihi Indeks provinsi DIY sebesar 0,441 dan nasional sebesar 0,384. Ini jelas menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta.

Tabel 2. *Indeks Gini DIY*

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
D.I. Yogyakarta	0.434	0.441	0.439
Kulonprogo	0.379	0.367	0.380
Bantul	0.418	0.441	0.410
Gunungkidul	0.352	0.323	0.316
Sleman	0.420	0.425	0.418
Yogyakarta	0.421	0.464	0.519

Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya menanggulangi kemiskinan dengan membentuk program Gandeng Gendong. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018. Dengan adanya program Gandeng Gendong yang lebih mengutamakan nilai gotong royong dan partisipasi diharapkan akan mampu menekan permasalahan kemiskinan yang ada di Kota Yogyakarta. Program Gandeng Gendong menekankan adanya kolaborasi diantara unsur 5K (Kota, Kampus, Korporasi, Kampung, dan Komunitas) yang tertuang dalam program Gandeng Gendong.

Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk program masterplan Gandeng Gendong kelurahan untuk menyelesaikan permasalahan kesejahteraan masyarakat. Heroe Purwadi menjelaskan bahwa Masterplan kelurahan akan menjadi pedoman pembangunan di Yogyakarta (Republika.com). Salah satu kelurahan yang sudah mengembangkan program masterplan berbasis kelurahan adalah Kelurahan Gedongkiwo. Kelurahan Gedongkiwo menjadi salah satu pilot project penyusunan masterplan di Kota Yogyakarta (Adianti, 2021). Kelurahan Gedongkiwo menjadi Kelurahan dengan tingkat kemiskinan paling tinggi nomor 5 di Kota Yogyakarta. Hal ini menjadi salah satu fokus atau tujuan dalam penyusunan masterplan

Kelurahan Gedongkiwo. Dengan adanya roadmap pembangunan dalam bentuk masterplan diharapkan akan membantu dalam menyusun pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Gedongkiwo untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian menampilkan hal-hal yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Secara garis besar metode penelitian memaparkan penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian apakah penelitian merupakan penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Bagian ini juga memuat informasi mengenai deskripsi objek dan sample yang digunakan (responden/ profil kasus), metode pengumpulan data, ukuran sampel, dan metode analisis

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, antara lain : Kelurahan Gedongkiwo sebagai pilot project program Masterplan Kelurahan, Bappeda Kota Yogyakarta, Kampung Suryowijayan, Gedongkiwo, dan Dukuh, Perwakilan Kampus, Perwakilan Komunitas. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan metode Purposive. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan beberapa alat bantu penelitian yaitu pedoman wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi untuk menguji keabsahan data. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda (Creswell, 2015). Dalam penelitian ini menggunakan tiga tahapan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992: 16-20) antara lain : Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

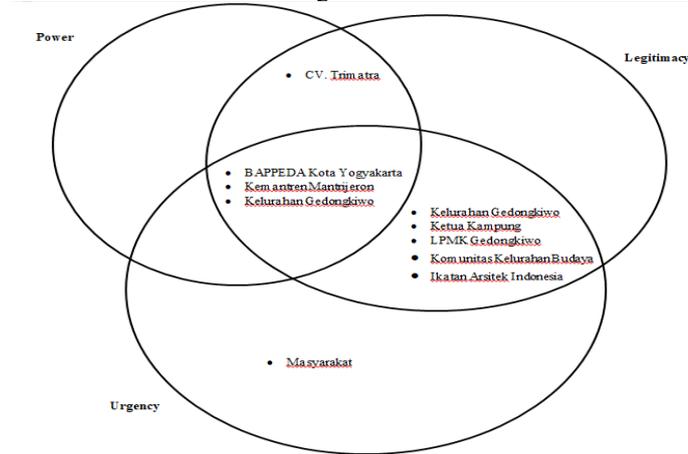
## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Identifikasi Stakeholder**

Ada sembilan stakeholder yang terlibat dalam penyusunan masterplan Kelurahan Gedongkiwo, diantaranya Kelurahan Gedongkiwo, Kemantren Mantrijeron, BAPPEDA Kota Yogyakarta, LPMK Kelurahan Gedongkiwo, Ketua Kampung, Ketua Kelurahan Budaya, Ikatan Arsitek Indonesia, CV. Trimatra, dan Masyarakat. Kesembilan stakeholder ini telah mewakili unsur 5K (Kampung, Kota, Kampus, Komunitas, dan Korporasi) yang ada didalam program Gandeng Gendong. Proses Identifikasi stakeholder dalam penelitian ini akan menggunakan teori Salience Model dari Mitchell, dkk (1997) yang menjelaskan bahwa ada tiga indikator yang membuat stakeholder penting bagi organisasi, yaitu kekuatan (power), urgensi (Urgency), dan hak kekuasaan (legitimacy).

Berdasarkan analisis salience model digambarkan dalam diagram berikut :

Gambar 1. Diagram Saliense Model



Berdasarkan hasil analisis diatas, maka diperoleh identifikasi stakeholder sebagai berikut :

*a. Defintive Stakeholder*

Definitive stakeholder merupakan kelompok yang memiliki legitimasi, kekuasaan dan urgensi, yang merupakan kelompok koalisi dominan dari organisasi. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam penyusunan masterplan Kelurahan Gedongkiwo yang tergolong kedalam definitive stakeholder antara lain : BAPPEDA Kota Yogyakarta dan Kemantren Mantrijeron. Kedua stakeholder tersebut jelas memiliki legitimasi sebagai lembaga Pemerintahan dari tingkat Kota hingga Kelurahan. Sementara kekuasaan yang dimiliki oleh BAPPEDA Kota Yogyakarta dalam bentuk kontrol anggaran dan kegiatan monitoring dan evaluasi. Hal ini didasari adanya urgensi permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta dan adanya ketidaksinambungan tujuan pembangunan yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan BAPPEDA Kota Yogyakarta dengan yang ada di wilayah. Permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat tersebut yang juga menjadi dasar urgensi adanya penyusunan masterplan Kelurahan Gedongkiwo pada Kemantren Mantrijeron.

*b. Dependent Stakeholder*

Dependent stakeholder merupakan kelompok yang memiliki kepentingan perpaduan antara kemendesakan (urgency) yang kuat dan legitimacy yang sah tetapi tidak memiliki kekuasaan (power). Dalam penyusunan masterplan Kelurahan Gedongkiwo, stakeholder yang tergolong kedalam jenis Dependent Stakeholder adalah Kelurahan Gedongkiwo, LPMK, Ketua Kampung, Komunitas Kelurahan Budaya Gedongkiwo, dan Ikatan Arsitek Indonesia. Kelima stakeholder tersebut memiliki urgensitas yaitu permasalahan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, dan gap arah pembangunan yang telah disusun oleh Pemerintah Kota dengan yang ada di wilayah. Disisi lain Ikatan Arsitek Indonesia sebagai komunitas Arsitek memiliki

kepedulian terhadap permasalahan tersebut, dan keikutsertaan mereka dalam program ini adalah sebagai bentuk pengabdian masyarakat Ikatan Arsitek Indonesia terhadap permasalahan yang ada disekitarnya. Selanjutnya Kelima stakeholder tersebut memiliki legitimasi di mata masyarakat. Kelurahan Gedongkiwo dan LPMK merupakan instansi atau lembaga struktural yang ada di Kelurahan Gedongkiwo yang memang berurusan dengan urusan administratif warga dan pemegang arah pembangunan yang ada di Kelurahan Gedongkiwo. Hal ini dibuktikan dengan Kelurahan Gedongkiwo dan LPMK menjadi koordinator dalam penyusunan masterplan Kelurahan Gedongkiwo.

*c. Dominant Stakeholder*

Dominant stakeholders merupakan kelompok yang memiliki kepentingan perpaduan antara kekuasaan (power) yang kuat dan legitimasi yang sah, maka pengaruh mereka terjamin. Stakeholder yang terlibat dalam penyusunan masterplan Kelurahan Gedongkiwo yang tergolong dalam jenis dominant stakeholder adalah CV. Trimatra. Dalam penyusunan masterplan Kelurahan Gedongkiwo dilakukan dengan skema pengadaan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang mengharuskan adanya perusahaan berbadan hukum sebagai penyusun masterplan Kelurahan Gedongkiwo. Yang kemudian CV. Trimatra merupakan perusahaan yang berhasil mendapatkan mandate untuk menyusun masterplan Kelurahan Gedongkiwo bersama dengan Ikatan Arsitek Indonesia.

*d. Demanding Stakeholder*

Demanding stakeholder merupakan kelompok yang memiliki kepentingan yang mendesak, tetapi bukan dalam bentuk kekuasaan maupun legitimasi. Kelompok ini dapat mempengaruhi (mengganggu) organisasi tetapi tidak selalu mendapatkan perhatian manajemen perusahaan. Dalam penyusunan masterplan Kelurahan Gedongkiwo, stakeholder yang termasuk kedalam golongan ini adalah masyarakat. kelompok masyarakat sebenarnya memiliki urgensi atas masalah kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, dan potensi yang belum terakomodasi dengan baik lewat kebijakan pemerintah. Yang kemudian seharusnya dengan adanya masterplan Kelurahan Gedongkiwo ini dapat mengangkat potensi yang ada di Gedongkiwo.

### 3.2 Kategorisasi Stakeholder

Overseas Development Administrations (1995) dan Grimble (1998) membagi stakeholder menjadi tiga kelompok, antara lain : Stakeholder primer, Stakeholder sekunder, dan stakeholder kunci. Kategorisasi stakeholder dalam penyusunan masterplan Kelurahan Gedongkiwo akan dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3. Kategorisasi *Stakeholder*

No	Kategorisasi <i>Stakeholder</i>	<i>Stakeholder</i>
1.	Primer	LPMK Gedongkiwo
2.		Ketua Kampung
3.		Kelurahan Budaya Gedongkiwo

4.		
5.		Masyarakat
6.	Sekunder	Ikatan Arsitek Indonesia
7.		CV. Trimatra
8.	Kunci	BAPPEDA Kota Yogyakarta
9.		Kemantren Mantrijeron
10.		Kelurahan Gedongkiwo

### 3.3 Analisis Hubungan Antar Stakeholder

Langkah terakhir dalam stakeholder dalam proses penyusunan masterplan Kelurahan Gedongkiwo adalah analisis hubungan antar stakeholder. Dalam penelitian ini analisis hubungan antar stakeholder dilakukan dengan menggunakan metode actor-linkage matrices yang akan disajikan dalam bentuk tabel. Analisis hubungan antar stakeholder akan dianalisis berdasarkan pola hubungan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar stakeholder. Cleary (2008) menjelaskan bahwa unsur komunikasi setidaknya meliputi Komunikator, Pesan, Komunikan, dan Timbal balik (feedback). Sementara unsur koordinasi yang baik menurut Shaleh, dkk (2013) menjelaskan ada : Komunikasi yang efektif, Kejelasan tujuan, Organisasi yang sederhana, dan keberlanjutan. Sementara unsur-unsur dari kerjasama menurut Saputra dan Rudyanto (2005) antara lain : Kesamaan tujuan, Komunikasi, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam proses analisis hubungan antar stakeholder menggunakan tabel yang elemen diagonalnya diisi dengan aktor-aktor yang terlibat. Dengan metode ini akan terlihat hubungan setiap stakeholder yang terlibat dalam perumusan masterplan berbasis Kelurahan Gedongkiwo.

Tabel 4. Actor-Linkage Matrices

	Kelurahan	Kemantren	Bappeda	LPMK	Ketua Kampung	Ketua Kelurahan Budaya	Ikatan Arsitek Indonesia	CV Trimatra	Masyarakat
Kelurahan		Koordinasi	Komunikasi	Komunikasi dan Koordinasi	Komunikasi	Tidak ada	Koordinasi, Komunikasi, dan Kerjasama	Kerjasama	Tidak ada
Kemantren			Komunikasi dan koordinasi	Komunikasi	Tidak ada	Tidak ada	Komunikasi, Koordinasi, dan kerjasama	Kerjasama	Tidak ada
Bappeda				Komunikasi	Komunikasi	Tidak Ada	Komunikasi	Kerjasama	Tidak ada

	Kelurahan	Kemantren	Bappeda	LPMK	Ketua Kampung	Ketua Kelurahan Budaya	Ikatan Arsitek Indonesia	CV Trima tra	Masyarakat
							dan Kerja sama		
LPMK					Komunikasi dan Koordinasi	Komunikasi dan Koordinasi	Komunikasi, Koordinasi, dan kerja sama	Tidak ada	Komunikasi
Ketua Kampung						Komunikasi	Komunikasi dan Kerja sama	Tidak Ada	Komunikasi
Ketua Kelurahan Budaya							Komunikasi	Tidak ada	Tidak ada
Ikatan Arsitek Indonesia								Komunikasi, koordinasi, dan kerja sama	Komunikasi dan kerja sama
CV Trima tra									Tidak ada
Masyarakat									

#### 4. Kesimpulan

Kesimpulan ditulis dalam bentuk narasi dan bukan dalam bentuk *bullet* ataupun *numeral*. Kesimpulan memuat temuan penting yang selaras dengan tujuan penelitian. Tuliskan juga keterbatasan yang ada pada penelitian anda (*limitation*) dan saran/arahan untuk penelitian berikutnya (*future research suggestion*).

Masterplan Kelurahan Gedongkiwo merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyelaraskan tujuan pembangunan yang disusun Pemerintah Kota Yogyakarta dalam RPJMD dengan yang dilakukan di wilayah. Dengan adanya masterplan diharapkan akan membantu wilayah dalam merumuskan pembangunan sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi di wilayah. Selain itu dengan adanya masterplan Kelurahan Gedongkiwo juga akan menjadi dokumen yang dapat digunakan untuk mencari titik ungkit ekonomi

dilingkup wilayah Kelurahan Gedongkiwo untuk membantu menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Kota Yogyakarta. Ada sembilan stakeholder yang terlibat dalam penyusunan masterplan Kelurahan Gedongkiwo, diantaranya Kelurahan Gedongkiwo, Kemantren Mantrijeron, BAPPEDA Kota Yogyakarta, LPMK Kelurahan Gedongkiwo, Ketua Kampung, Ketua Kelurahan Budaya, Ikatan Arsitek Indonesia, CV. Trimatra, dan Masyarakat. Kesembilan stakeholder ini telah mewakili unsur 5K (Kampung, Kota, Kampus, Komunitas, dan Korporasi) yang ada didalam program Gandeng Gendong.

Dalam pelaksanaannya, Masterplan Kelurahan Gedongkiwo masih dianggap kurang efektif untuk menangani masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gedongkiwo. Hal ini dikarenakan masterplan Kelurahan Gedongkiwo belum melibatkan seluruh stakeholder yang ada termasuk masyarakat dan komunitas-komunitas yang ada di Gedongkiwo. Waktu yang singkat dalam penyusunannya memungkinkan jadi penyebab kurang maksimalnya masterplan Kelurahan Gedongkiwo. Selain itu gagalnya monev di tahun 2022 menyebabkan belum adanya revisi dari masterplan Kelurahan Gedongkiwo.

#### Referensi

- [1] Adianti, I. (2021). Proses Penyusunan Masterplan Kampung melalui Focus Group Discussion (FGD). *Jurnal Abmas Negeri*, 2 (1). 17-24
- [2] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019) Laporan Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2019.
- [3] Badan Pusat Statistik DIY. (2023). Berita Resmi Statistik No. 07/01/34/Th. XXV, Profil Kemiskinan D.I.Yogyakarta September 2022
- [4] Badan Pusat Statistik DIY. (2023). Berita Resmi Statistik No. 16/02/34/Th. XXV, Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulan IV 2022
- [5] Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022. Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XXIV Profil Kemiskinan D.I.Yogyakarta September 2021. Yogyakarta
- [6] Badan Pusat Statistik, 2022. Berita Resmi Statistik No. 07/01/Th. XXV Profil Kemiskinan di Indonesia September 2021
- [7] Badan Pusat Statistik. (2023). Berita Resmi Statistik No. 15/02/Th. XXVI, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2022.
- [8] Buse, et al. 2005. *Making Health Policy, Understanding Public Health*. Open California State University, Long Beach.
- [9] Cleary, Sandra. (2008). *The Elements Of Comunnication. The Communication Handbook: A Student Guide to Effective Communication*. 1-10
- [10] Creswell, John W (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*, terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- [11] Dwiyanto, Agus. (2010). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [12] Grimble, R. (1998). *Stakeholder Methodologies In Natural Resource Management*. Chatam, UK: Natural Resource Institute.
- [13] Grimble, R. 1998. *Stakeholder Methodologies In Natural Resource Management*. Chatam, UK: Natural Resource Institute.
- [14] Grimble, R. dan Wellard, K. (1997) *Stakeholder Methodologies in Natural Resource Management: A Review of Principles, Contexts, Experiences and Opportunities*. *Agricultural Systems*, 55, 173-193.
- [15] Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- [16] Mitchell, R.K., dkk. (1997). Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts. *The Academy of Management Review*, 22 ( 4). 853-886
- [17] Overseas Development Administration. (1995). Guidance note on how to do stakeholder analysis of aid projects and programmes. Bonn: Social Development Departement, Overseas Development Administration.
- [18] Pemerintah Kota Yogyakarta. (2020). Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta 2020. Kota Yogyakarta.
- [19] Reed, M.S, dkk. (2009). Who's In And Why? A Typology Of Stakeholder Analysis Methods For Naturalresource Management, *Journal of Environmental Management* 90
- [20] republika.co.id (2018). Pemkot Yogyakarta Luncurkan Program Gandeng Gendong. Dari <https://www.republika.co.id/berita/p6yo5a423/pemkot-yogyakarta-luncurkan-program-gandeng-gendong>. Diakses pada 4 April 2023.
- [21] republika.co.id (2021). Yogya Susun Masterplan Gandeng Gendong Berbasis Kelurahan. Dari : <https://republika.co.id/berita/repjogja/kabar-jogja/qs08f6399/yogya-susun-masterplan-gandeng-gendong-berbasis-kelurahan>. Diakses pada 4 April 2023
- [22] Yanuardi. (2012). Diktat Teori Pembangunan. Prodi Administrasi Negara Universitas Negeri Yogyakarta